

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem yang diciptakan untuk memberikan kebebasan kepada setiap umat manusia dalam beraspirasi dalam suatu negara. Landasan negara demokratis adalah kebebasan; yang menurut pendapat orang pada umumnya, hanya dapat dinikmati dalam negara semacam itu, hal ini diakui sebagai tujuan utama setiap demokrasi. Salah satu prinsip kebebasan ialah setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah, dan memang keadilan demokratis merupakan penerapan persamaan jumlah bukan proporsi.¹

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, seperti diketahui bahwa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan berdasarkan konstitusi UUD Tahun 1945 secara legalitas formal telah memenuhi kriteria sebagai negara yang menganut paham demokrasi. Isi konstitusi telah menunjukkan adanya pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Masing-masing lembaga tinggi negara mempunyai fungsi-fungsi terperinci sebagai mana fungsi pembagian kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan rakyat yang di representasikan oleh orang-orang yang di ketiga lembaga tersebut. Untuk melengkapi pilar-pilar demokrasi, pada bulan November tahun 1945, melalui maklumat No. X yang

¹ Diane Ravitch dan Abigail Thernstrom Penerjemah Hermoyo, *Demokrasi Klasik dan Modern*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal.1

ditetapkan oleh Wakil Presiden dimana isi maklumat No. X tersebut dibolehkan pendirian partai-partai politik.²

Perkembangan partai politik di Indonesia berkembang dalam beberapa masa, awal mula partai politik di Indonesia berawal dari masa penjajahan Belanda. Pada masa kedua yaitu masa kependudukan Jepang semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Masa ketiga masa kemerdekaan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculan partai-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem multi-partai. Setelah itu Indonesia memasuki Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding masa-masa sebelumnya.³

Seiring berlangsungnya kegiatan partai politik dalam melewati beberapa dinamika politik di Indonesia berbagai macam bentuk gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh partai politik salah satunya gerakan oposisi. Gerakan oposisi di Indonesia adalah contoh sederhana dari dilema konfrontasi oposisi stabilitas politik yang menjadi kendala tersendiri bagi demokrasi sistem politik. Dalam bahasa politik oposisi juga disebut oposan mendefinisikan dirinya dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling populer adalah partai politik. Partai politik yang kalah dalam Pemilu biasanya

² Bambang Istanto, *Potret Buram Politik Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hal. 73

³ Perkembangan Partai Politik di Indonesia, <http://www.google.co.id/amp/s/kakarisah.wordpress.com/perkembangan-partai-politik-di-indonesia/amp>, diakses tanggal 22-09-2018.

mengambil jarak dengan penguasa dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaum oposan.

Faktor dan alasan kenapa mereka mengambil sikap dengan mendeklarasikan diri sebagai oposisi, tentunya bermacam-macam. Ada alasan keuntungan, bisa juga alasan ideologis. Satu hal yang perlu ditekankan dalam konsep oposisi adalah konsep oposisi tidak hanya menempatkan diri melawan pemerintah. Oposisi, sesuai dengan katanya bisa menempatkan diri dimanapun dalam suatu kelompok, organisasi, lembaga, dan dimana saja.⁴

Di Indonesia sendiri partai oposisi terhadap suatu pemerintahan sudah terjadi pada zaman Presiden Soekarno atau Orde Lama hingga sekarang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehubungan dengan itu maka penulis akan melakukan suatu penelitian mengenai gerakan oposisi yang sedang terjadi sekarang atau lebih tepatnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana gerakan oposisi tersebut diperankan oleh salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Partai Gerindra merupakan partai politik yang tetap konsisten berada pada sikap oposisi dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun sikap oposisi yang di perankannya tidak begitu ditampakkannya, berbeda pada era Presiden Joko Widodo, partai Gerindra berada pada sikap oposisi yang benar-benar frontal, hal ini dibuktikan oleh beberapa kritik yang diberikan seperti: kebijakan harga

⁴ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Ibid hal. 10

BBM⁵; kebijakan Perpres No.20 Tahun 2018⁶; dan yang paling di soroti adalah kebijakan tentang pembangunan infrastruktur yang dinilai berlebihan.⁷

Menariknya dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan sikap oposisi yang seperti apa yang dilakukan partai Gerindra di era Presiden Joko Widodo, terlebih lagi partai Gerindra sempat mengalami kekalahan pada pemilihan umum Presiden 2014 yang melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bersaing pada saat itu melawan Joko Widodo dalam beberapa pendapat yang paling populer terjadinya sikap oposisi yang dilakukan oleh Partai Gerindra karena faktor kekalahan Prabowo Subianto dalam pemilihan umum presiden tahun 2014 silam. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada beberapa faktor lain yang membuat partai Gerindra mengambil keputusan untuk berada dalam sikap oposisi sehingga penelitian ini akan lebih menarik apabila dikaji dan diteliti lebih mendalam yang penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sikap Oposisi Partai Gerindra Selama Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019”**.

⁵ Partai Gerindra Kritik Pemerintahan, <https://www.suara.com/news/2018/10/10/224807/harga-bbm-naik-partai-gerindra-kritik-pemerintah> , diakses tanggal 22-09-2018.

⁶ Gerindra Kritik Perpres No.20 Tahun 2018, <https://www.jpnn.com/news/elite-gerindra-sebut-perpres-tka-bukti-jokowi-salah-logika> diakses tanggal 22-09-2018.

⁷ Gerindra Kritik Pembangunan di era Presiden Joko Widodo, <https://www.alinea.id/bisnis/gerindra-kritik-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi-b1Xjo9lyw> diakses tanggal 22-09-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap oposisi yang diperankan oleh partai Gerindra ?
2. Bagaimana bentuk oposisi yang diperankan oleh Partai Gerindra ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sikap oposisi yang diperankan oleh Partai Gerindra.
2. Untuk mengetahui bentuk oposisi yang diperankan oleh Partai Gerindra.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Politik. Diharapkan pula sebagai acuan dalam penelitian dimasa depan terkait Partai Politik Oposisi di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai perluasan mengenai sikap dan bentuk oposisi dalam suatu lembaga politik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada masyarakat, terutama untuk mendeskripsikan pola strategi partai politik. Sehingga dapat diketahui bentuk gerakan dalam suatu partai yang oposisi, sehingga *check and balance* dalam negara demokrasi dapat dicapai.

E. Tinjauan Pustaka

Secara teoritis, kajian mengenai analisis gerakan partai politik oposisi dalam pemerintah Joko Widodo belum pernah dilakukan. Adapun karya ilmiah, buku, dan laporan hasil penelitian mengenai oposisi kebanyakan penelitian terkait oposisi dari era-era sebelumnya dan dari sudut pandang Islam. Namun penelitian tentang oposisi, terlebih khusus tentang sikap seperti apa yang dilakukan oleh partai Gerindra dan apa dampak dari sikap oposisi tersebut terhadap dinamika politik di Indonesia, belum dilakukan. Namun ada beberapa karya tulis ilmiah yang sengaja peneliti jadikan rujukan, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian.

Penelitian Tuswoyo Admojo mengenai Pemilu Tahun 2014, dalam jurnal yang berjudul *Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014* (Jurnal Kampus STIAMI, Program Studi Administrasi Negara, Jakarta). Menjelaskan bahwa partai oposisi dalam suatu negara dapat memberikan kestabilan demokrasi dan bukti nyata jalan demokrasi disuatu negara yang menganutnya.⁸

Namun demikian, bagi negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia, pelebagaan oposisi menjadi persoalan tersendiri. Hal itu terjadi karena kuatnya penolakan dari pihak-pihak yang anti oposisi. Secara garis besar penelitian ini memiliki tema yang hampir serupa dengan penelitian yang peneliti akan susun namun mengandung inti pembahasan yang berbeda.

⁸ Tuswoyo Admojo, *Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014*, Vol. 1, No.2, Februari 2016

Hal yang hampir sama pula dengan tulisan Firman Noor dalam jurnalnya yang berjudul *Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia* (Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan). Firman Noor memberikan penjelasan mengenai arti penting oposisi dalam negara demokrasi. Menurutnya oposisi adalah stimulus persaingan yang sehat di antara para elite politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnas, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan lain yang masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah.⁹

Singkatnya penelitian ini telah memberikan bagaimana dinamika yang terjadi pada pemerintahan apabila tidak ada tekanan atau stagnasi dari pihak yang bersebrangan, namun penelitian ini belum seutuhnya mewakili penelitian yang peneliti akan teliti, akan tetapi beberapa poin penting dalam tulisan ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian di pembahasan selanjutnya.

Damanhuri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya dengan judul *Konsep Partai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, disusun pada tahun 2009, skripsi ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap gerakan oposisi, menurutnya oposisi merupakan sesuatu yang mulia karena oposisi mampu mendukung pada para penguasa

⁹ Firman Noor, *Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Vol. 42, No. 1, Juni 2016

untuk mampu menjalankan pemerintahan dengan baik melalui tindakan mengontrol, mengawasi dan mengkritik. Dalam pandangan hukum Islam oposisi yang dilakukan partai politik merupakan sebuah keharusan karena partai adalah golongan atau *Ummah* yang mempunyai kapasitas serta basis kekuatan massa yang mendukungnya.¹⁰

Penelitian di atas melibatkan pandangan hukum Islam dalam menanggapi gerakan oposisi yang dilakukan partai politik, menurutnya gerakan oposisi merupakan keharusan karena pemerintah perlu di kontrol, diawasi dan di kritik, pernyataan penelitian di atas belum sepenuhnya memberikan penjelasan yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan peneliti bahas, sehingga penelitian di atas belum dapat di jadikan referensi bagi peneliti.

Gia Noor Syah Putra¹¹, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga dalam skripsi dengan judul *Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla*, dalam skripsi dibahas tentang sikap politik Koalisi Merah Putih sebagai kelompok koalisi oposisi terhadap pemerintahan. Koalisi Merah Putih sendiri merupakan kelompok partai oposisi yang didalamnya terdapat beberapa partai seperti partai Gerindra, PKS, Golkar, PPP, PBB, PAN namun beberapa dari partai tersebut secara perlahan mengundurkan diri dan memilih

¹⁰ Damanhuri, *Konsep Partai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009.

¹¹ Gia Noor Syah Putra, *Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.

untuk bergabung dengan pemerintahan hingga akhirnya Koalisi Merah Putih resmi di bubarkan. Dalam temuan skripsi ini membahas mengenai sikap kritisi dari Koalisi Merah Putih terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menolak beberapa kebijakan seperti kenaikan harga BBM bersubsidi, penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Perpres nomor 39 tahun 2015, dan pencabutan subsidi BBM. Skripsi ini pada dasarnya membahas sikap oposisi seperti yang akan penulis teliti, namun penulis belum menemukan poin yang dianggap sama dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

Penelitian yang terkait lainnya adalah Djayadi Hanan dalam disertasi doktoralnya di Departemen Ilmu Politik di *The Ohio State University* (OSU) yang berjudul *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. Studi tersebut menelaah fenomena relasi eksekutif-legislatif dalam sebuah sistem presidensial multipartai. Hanan menjelaskan bahwa keberadaan oposisi dalam sistem presidensial ini sebagai sebuah keniscayaan karena sistem sistem partai yang terfregmentasi dan desakan akan hubungan yang lebih seimbang antar lembaga eksekutif-legislatif.¹²

Dalam tulisannya Djayadi Hanan menuliskan gerakan oposisi merupakan suatu sikap keniscayaan bagi individu maupun kelompok dalam lingkup eksekutif dan legislatif, akan tetapi tulisan ini belum memberikan penjelasan yang penuh mengenai pembahasan dan masalah yang peneliti angkat.

¹² Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*, (Bandung : Al-Mizan, 2014), hal. 217

Dari beberapa jurnal dan skripsi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa secara teoritis, kajian mengenai analisis gerakan partai politik oposisi serta dampak yang ditimbulkannya dalam pemerintah Joko Widodo belum pernah dilakukan. Adapun karya ilmiah, buku dan laporan hasil penelitian mengenai oposisi kebanyakan penelitian terkait oposisi dari era-era sebelumnya dan dari sudut pandang Islam serta belum sepenuhnya mengarah pada sistem pemerintahan Joko Widodo dan bentuk-bentuk sikap oposisi yang diperankan oleh Partai Gerindra.

F. Kerangka Teori

Oposisi dalam bahasa Inggris adalah *opposition* dan dalam bahasa latin sering disebut dengan *opposites*, *opponere* ,yang berarti menghadapkan, membantah, menyanggah, atau menentang. Sementara itu definisi oposisi dalam Kamus Ilmiah Populer adalah golongan perlawanan atau penentangan. Sehingga jika merujuk pada makna dari kamus tersebut, maka oposisi akan selalu dihadirkan sebagai kelompok yang bermusuhan. Padahal, kenyataannya oposisi adalah entitas yang sangat diperlukan dalam dunia politik modern dan oposisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern¹³.

Beroposisi menurut pengamat politik Eep Saefullah Fatah berarti melakukan pengawasan terhadap praktek kekuasaan. Pengawasan disini berarti oposisi mengabarkan kekeliruan itu dan membangun tindakan

¹³ Redi Panuju, *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*. (Interprebook: Yogyakarta, 2011), hal. 17

perlawanan terhadap pemerintah ketika kekuasaan melenceng dan ketika kekuasaan menjalankan fungsinya secara benar maka oposisi bertindak sebagai pendukung sekaligus membangun kesadaran publik untuk memberikan dukungan untuk konsistensi.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori dari Robert Alan Dahl, yaitu Teori Oposisi dalam teori besar Poliarki. Dalam menganalisis suatu oposisi maka dibutuhkan 6 pola yaitu *Cohesion* (Kepaduan), *Competitiveness* (Daya Saing), *Location* (Lokasi), *Characteristic* (Ciri Khas), *Purpose* (Tujuan), *Strategy* (Strategi).

1. *Cohesion* (Kepaduan)

Dalam beberapa negara Demokratis, bahwa orang yang secara aktif beroposisi pernah terkonsentrasi dalam satu wadah yaitu organisasi atau partai politik. Sebab, partai politik adalah manifestasi yang paling nyata dan bentuk oposisi yang paling efektif dalam sebuah negara demokratis. Bentuk khusus inilah yang kemudian menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Tetapi sampai kemana oposisi initerkonstrasi tergantung kepada sistem partai yang terdapat disuatu negara. Di beberapa negara-negara demokrasi, sebagian oposisi berbentuk kelompok dalam partai. Tetapi konsentrasi paling tinggi kadarnya terdapat pada sistem dwipartai, dimana partai yang tidak berkuasa secara nyata memonopoli kalangan oposisi.

¹⁴ Ibid, *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*, hal. 19

Dalam sistem oposisi seperti di Indonesia, oposisi tersebar di antara beberapa partai politik. Dengan demikian, sistem multipartai sebagai cara yang wajar bagi pemerintah dan oposisi untuk konflik yang terjadi. Sejauh suatu oposisi memperhitungkan sistem partai dalam memilih strategi, sistem partai yang berbeda-beda haruslah dihubungkan dengan strategi yang berbeda-beda pula.

2. *Competitiveness* (Daya Saing)

Sifat bersaing yang dimaksud bukanlah orientasi psikologis para pelaku politik, melainkan caranya keuntungan dan kerugian para lawan politik dalam pemilihan umum dan perolehan kursi di Parlemen yang saling dihubungkan satu sama lain. Secara empiris harus dipahami, bahwa kekuasaan eksekutif itu cenderung berpotensi menjadi birokratis, dan tanpa pengawalan sebuah kekuatan oposisi akan cenderung menjadi stagnan. Tetapi keberadaan partai politik yang menjadi bagian koalisi di dalam pemerintahan tentu akan memudahkan partai tersebut memperoleh akses sumber daya politik dan ekonomi sebagai sumber pembiayaan partai. Sumber daya disini salah satunya bisa dimaknai berupa akses terhadap sumber daya politik maupun finansial yang bisa diperoleh dengan memiliki pengaruh dan peranan dikekuasaan.

Dengan demikian daya saing oposisi dalam pengertian yang dipergunakan disini untuk sebagian besarnya, walaupun bukan untuk seluruhnya tergantung kepada jumlah dan sifat dasar partai yaitu seberapa jauh oposisi itu terkonstrasi. Melalui bermacam-macam sistem dimana

strategi oposisi bersifat kerjasama dan bersifat persaingan, sampai kepada sistem dimana partai minoritas yang biasanya merupakan oposisi bergabung dengan partai mayoritas, baik dalam wilayah eksekutif maupun legislatif.

3. *Location* (Lokasi)

Karena oposisi mencoba mengadakan perubahan dalam tingkah laku pemerintah, maka ia akan mempergunakan beberapa sumber daya politiknya untuk mengajak, mendorong, atau memaksa pemerintah untuk mengubah tindakannya. Situasi atau keadaan dimana oposisi mempergunakan sumber dayanya untuk mengadakan suatu perubahan dapat dinamakan lokasi pertarungan antara oposisi dan pemerintah.

Pentingnya masing-masing lokasi pertarungan ini berbeda dari satu sistem ke sistem yang lain. Pada beberapa sistem, satu lokasi secara relative dapat dikatakan amat menentukan. Kemenangan dalam pertarungan disitu cukup memperbesar kemungkinan mencapai kemenangan dilokasi lainnya. kalangan oposisi mungkin memenangkan pertarungan pada suatu lokasi, tetapi kalah dalam pertarungan dilokasi yang lain.

4. *Characteristic* (Ciri Khas)

Ciri khas dari suatu oposisi dalam sistem politik pada umumnya adalah akibat dari tiga faktor sebelumnya, yaitu kepaduan, daya saing, dan pentingnya lokasi yang berbeda-beda. Lokasi pertarungan yang penting antara oposisi dan pemerintah adalah parlemen nasional, pemilihan umum

untuk parlemen dan media massa. Karena itu parlemen sebetulnya mempunyai kedudukan memonopoli pertarungan-pertarungan resmi dari hari ke hari. Sebagai akibat semua dari kondisi ini, maka oposisi demikian tajamnya dibedakan sehingga tanpa ragu-ragu dilihat partai mana yang menjadi oposisi.

Dalam sistem kepartaian suatu negara, merupakan faktor penting yang menentukan adalah apa yang dikerjakan oleh pemerintahannya terhadap rakyatnya. Faktor-faktor yang paling menarik bagi kita tentang pemerintahan dan politik yaitu stabilitas, revolusi, kebebasan, persamaan, keadilan sangat dipengaruhi oleh partai politik dan sistem yang diterapkan. Sistem presidensial mengarahkan negara untuk menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Selain itu, sistem presidensial dicirikan oleh pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer.

Dalam sistem presidensial, oposisi merupakan wujud modern dari ide demokrasi. Jika kelompok itu tidak diakui, yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagai ancaman. Jadi yang dimaksud disini adalah oposisi loyal. Dengan kata lain beroposisi kepada pemerintahan tapi loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama.

5. *Purpose (Tujuan)*

Meskipun jelas bahwa oposisi itu amat berbeda-beda dalam hal tujuannya, akan tetapi terlampau sulit untuk menempatkan perbedaan-perbedaan itu didalam suatu skema analitis yang dapat ditangani. Pelaku-pelaku politik, diketahui mempunyai tujuan-tujuan baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu selalu disimpulkan dari tujuan-tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek mungkin mempengaruhi pilihan strategi sehingga tujuan jangka panjang mereka secara realistis dapat dikatakan tak lain hanya merupakan akibat tujuan jangka pendek.

Oposisi tidak saja bertugas memperingatkan pemerintah terhadap kemungkinan salah kebijakan atau salah tindakan, melainkan juga menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Kewajiban oposisi adalah melakukan kualifikasi apakah sesuatu itu harus dilakukan, tidak harus dilakukan, atau malah tidak dilakukan sama sekali. Perlu atau tidaknya oposisi sangat bergantung pada pandangan dan persepsi tentang kekuasaan. Sudah jelas bahwa adanya partai oposisi merupakan sebuah jalan formal untuk menjalankan peran tersebut, yang perlu ditekankan adalah bahwa oposisi dibutuhkan sebagai kritik kepada kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak semena-mena.

Dalam hal oposisi, maka tujuan-tujuan yang menguasai adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh oposisi dengan jelas mengubah tindakan pemerintah. Mengenai tujuan, oposisi menentang suatu perubahan

yang mungkin terjadi dalam personalia pemerintahan, kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah, struktur sistem politik dan struktur sosial ekonomi. Meskipun kategori ini sama sekali bukan merupakan hal yang dapat dibedakan dengan jelas, tetapi untuk kepentingan penyederhanaan ini lebih jelas dapat dibedakan daripada keadaan yang sesungguhnya.

6. *Strategy (Strategi)*

Oposisi dibutuhkan bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan. Oposisi juga diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui konteks politik serta diuji dalam wacana politik yang terbuka dan dihadapkan publik. Dari sinilah oposisi dibutuhkan, semacam *advocates diabolic* atau *devil's advocate* yang memainkan peran sebagai setan yang menyelamatkan negara demi kebaikan bersama. Dalam peran ini, oposisi berkewajiban mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu kebijaksanaan.

Strategi-strategi tertentu yang dipakai kalangan oposisi untuk mengubah tindakan pemerintah menunjukkan banyak sekali ragamnya. Karena strategi-strategi tersebut merupakan hasil dari kemampuan manusia yang luar biasa untuk mempergunakan daya akalnya, termasuk kelihaihan dari orang-orangnya. Berikut merupakan macam-macam strategi yang dijalankan oleh oposisi :

- a. Strategi I : Oposisi akan memusatkan perhatiannya kepada pesaing ketat dengan jalan berusaha untuk memperoleh jumlah suara dalam pemilihan umum, setidaknya untuk memenangkan kursi diparlemen.

Prinsip ini lebih ampuh ketika menerapkan sistem dwipartai. Adapun dari tujuan strategi ini adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan eksekutif atau paling tidak menjadi modal politik tersendiri.

- b. Strategi II : Hampir sama dengan strategi pertama, dalam strategi kedua ini oposisi berusaha untuk mendapatkan tambahan pemilih dan memperoleh tambahan kursi dalam pemilihan umum untuk parlemen, tetapi oposisi ini menganggap bahwa tidak akan dapat memenangkan mayoritas dalam parlemen, karena itu ia amat memusatkan perhatiannya pada bagaimana caranya untuk masuk dalam suatu koalisi yang memerintah dan memperoleh untung sebanyak mungkin dari tawar menawar dalam koalisi itu. Strategi ini tumbuh subur dalam sistem yang mempunyai lebih dari dua partai besar yang masing-masing mempunyai kadar persatuan partai yang kuat.
- c. Strategi III: Oposisi mempergunakan keseluruhan strategi II, bahwa banyak keputusan yang penting dibuat dalam tawar menawar diantara partai-partai. Kalaupun gagal untuk masuk dalam kabinet (koalisi) hal itu tidak berarti ia terhalang untuk mencapai beberapa dari tujuannya melalui tawar-menawar tersebut. Strategi ini biasa terlihat dalam sistem multipartai, dimana strategi II untuk diterapkan, sebab terdapat suatu struktur korporatisme demokratis yang amat berkembang.
- d. Strategi IV: Setiap lokasi dapat saja bersifat menentukan dalam suatu kasus tertentu, dan tidak ada satupun yang pada umumnya bersifat

menentukan. Karena itu, oposisi akan menyesuaikan taktik-taktik tertentu dengan sumber dayanya dengan satu atau berbagai lokasi yang paling mudah diserang. Ia mungkin memusatkan perhatiannya kepada aktivis-aktivis kelompok penekan, tawar-menawar dalam partai, siasat dalam badan legislatif, keputusan-keputusan hukum yang menguntungkan, memenangkan pemilihan umum, atau gabungan hal-hal tertentu.

- e. Strategi V: Sesungguhnya seperangkat strategi dipergunakan oleh oposisi yang mempunyai komitmen menjaga keberlangsungan masyarakat. Baik kalangan oposisi maupun pemerintahan berkeyakinan ketika kelangsungan hidup masyarakat terancam oleh kemelut isu nasional yang hebat, subversi, perang, dan lainnya. Ancaman politik seperti itu, cenderung mendorong pemerintah untuk mengajukan tawaran kepada oposisi untuk masuk dalam kabinetnya. Karena itu, lazimnya semua oposisi yang non revolusioner, terlibat untuk ikut dalam suatu pemerintahan koalisi atas dasar persyaratan-persyaratan yang paling menguntungkan.
- f. Strategi VI: Strategi ini mempunyai komitmen untuk menghancurkan masyarakat politik, terutama pada sistem yang berlaku. Strategi ini mempergunakan sumber daya apa pun juga yang dimiliki oleh oposisi yang menginginkan revolusioner, tujuan tentu mengganggu jalannya proses politik, mendiskreditkan sistem, melemahkan keabsahannya,

dana pada umumnya meningkatkan kelemahan bagi suatu perebutan kekuasaan oleh kalangan oposisi yang revolusioner.¹⁵

G. Metode Penelitian

Didalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian, metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memenuhi subjek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian analisis isi media (*Content Analysis*) dengan metode deskriptis analitis, yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui isi media, dokumen terkait, artikel atau majalah dan memverifikasi data-data yang sesuai dengan skripsi ini.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subjek penelitian. Yang kedua data sekunder yaitu meliputi :

a. Data Primer

Bahan Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa sikap politik dari Pengurus dan Anggota DPP Partai Gerindra yang tersaring dalam media massa, dalam hal ini media massa yang

¹⁵ Miriam Budiarjo, Op.Cit, 141-144.

digunakan adalah media massa online yang tentunya memiliki indikator seperti, memiliki badan hukum, memiliki versi cetak, dan memiliki peminat baca yang banyak, sehingga informasi yang diberikan mampu dipertanggungjawabkan.

b. Data Sekunder

Bahan Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur atau buku-buku, dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan sikap dan bentuk oposisi partai Gerindra.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data menggunakan beberapa dokumentasi guna untuk mendapatkan data primer yaitu :

- a. Analisis langsung terhadap isi media massa yang didalamnya terdapat sikap dan bentuk oposisi dari anggota serta pengurus DPP Partai Gerindra lalu dideskripsikan menjadi suatu pembahasan.
- b. Kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu dengan membaca, editing dan evaluasi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis isi media secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, atau menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya berdasarkan pokok rumusan masalah. Kemudian penyajian itu ditarik

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan baik.

5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan yang menyeluruh dan memudahkan untuk menelaah penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab berikut ini :

- a. BAB I Pendahuluan:** Terdiri dari pernyataan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori metode penelitian dan daftar pustaka.
- b. BAB II Gambaran Umum Subjek Penelitian:** Pada bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian DPP Partai Gerindra, kepengurusan umum dan kondisi politik di Partai Gerindra.
- c. BAB III Pembahasan dan Hasil :** bab ini berisikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang di angkat mengenai sikap oposisi partai Gerindra dan bentuk oposisi partai Gerindra yang diperankannya.
- d. BAB IV Kesimpulan dan Saran:** terdiri dari simpulan serta saran atas keseluruhan pembahasan yang di dapatkan selama penulisan penelitian berlangsung.